



PANDEMI COVID-19

Pengetatan Kegiatan Masyarakat di DIY

Butuh Ketegasan Pemerintah

YOGYAKARTA, KOMPAS — Ketegasan pemerintah menegakkan aturan sangat penting untuk efektivitas kebijakan pengetatan terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanpa ketegasan pemerintah daerah, upaya pembatasan pergerakan manusia untuk menekan laju penularan Covid-19 akan sia-sia.

"Kunci keberhasilan (pengetatan kegiatan) adalah konsistensi pemerintah daerah menegakkan regulasi di lapangan dan berapa jumlah penduduk yang bisa dikurangi mobilitasnya dua pekan itu," kata Riris Andono Ahmad, epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, saat dihubungi, Minggu (10/1/2021).

Pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat akan dilaksanakan mulai Senin, 11 Januari, hingga Senin, 25 Januari, di DIY. Pembatasan pergerakan dan kegiatan masyarakat ditetapkan lewat Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY untuk lima kabupaten/kota di DIY, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut berlaku bagi wilayah Pulau Jawa dan Bali.

"Sekarang (kondisi penularan Covid-19) sudah terlalu ting-



KOMPAS/P. RADITTA MAHENDRA TASA

gi. Sudah membebani sistem kesehatan yang ada. Ini harus direduksi. Mobilitas (masyarakat) harus dihentikan. Ini menjadi kontribusi masyarakat," tutur Riris.

Menurut data Dinas Kesehatan DIY, hingga Sabtu (9/1), total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY mencapai 14.647 orang. Di sisi lain, jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan juga terbatas karena

ruang unit perawatan intensif (ICU) tinggal 23 unit dan untuk pasien nonkritis tinggal 57 unit.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Noviar Rahmad mengatakan, pihaknya mengawasi perkantoran hingga pusat perbelanjaan. Ada enam tim Satpol PP DIY bersama TNI dan Polri yang berpatroli.

Sementara di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kepala Di-

nas Perindustrian dan Perdagangan Karawang Ahmad Suroto, Minggu, mengatakan, kluster industri masih penyumbang terbesar lonjakan kasus Covid-19 di Karawang. "Nyawa pekerja lebih utama dari sekadar urusan bisnis," ucap Suroto.

Saat ini, sekitar 680 dari total 954 industri mengajukan izin beroperasi pada masa adaptasi kebiasaan baru di Karawang, naik dari 480 industri pada Juli

2.

☐ Positif ☐ Sengaja ☐ Untuk Diketahui



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005